



Analisis Ruang Publik dan Keistimewaan

Lukas S Ispandriarno

DOMINASI wacana media massa saat melaporkan sidang terdakwa penyerbuan LP Cebongan mustahil diabaikan dalam konteks transformasi sosial menuju Keistimewaan Yogyakarta. Wacana dominan yang dimaksud adalah dukungan terhadap penembakan empat narapidana sebagai solusi pemberantasan kejahatan.

Sejumlah media hampir tidak pernah absen memasang judul menggambarkan pengakuan terdakwa dan arahan penasihat hukum bahwa penembakan yang dilakukan bukanlah sebuah kesengajaan ataupun perencanaan. Meski berkebalikan logika, dukungan eWarga Jogjai agar terdakwa dibebaskan lantaran dianggap berjasa memberantas kejahatan mendapat ruang terhormat di halaman muka. Dukungan ini menegaskan, apa yang dilakukan para tersangka merupakan sebuah kesengajaan, dan jauh sebelum itu tim investigasi telah mengumumkan motif pelaku sebagai murni balas dendam.

Mengikuti perkembangan ruang publik pertengahan abad 19 seperti digambarkan Habermas, ia memiliki ciri adanya debat terbuka, kupasan kritis, reportase penuh, aksesibilitas semakin

Ruang Publik Sambungan hal 1

meningkat dan kebebasan peserta di ruang publik dari kepentingan ekonomi dan kendali negara (Sumaryanto, 2010: 29). Di dalam ruang publik itulah manusia bergulat dengan realitas zaman, akan tetapi transformasi sosial yang demikian cepat mengakibatkan pergeseran peran. Di dalam ruang publik tidak lagi berlangsung komunikasi bebas dominasi dan hegemoni melainkan sarat distorsi dan manipulasi. Di sana terjadi dominasi atau hegemonisasi terhadap saluran akses ruang publik (Ibrahim, 2004: 3).

Adalah Soedjatmoko, pemikir kebudayaan dan pemimpin redaksi majalah Siasat (1952-1960) yang memiliki pemikiran komunikasi seperti halnya Habermas. Pemikiran Soedjatmoko sepaham dengan visi, misi, dan program Hamengku Buwono X saat menjadi calon Gubernur DIY tahun 2012-2017. Pemaparan bertajuk 'Yogyakarta Menyongsong Peradaban Baru' disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD DIY 21 September 2012. Dalam RPJPD Tahun 2005-2025, kaidah penuntun pembangunan daerah, disebutkan haluan dan arah kebijakan perspektif 20 tahun ke depan guna mengangkat derajat manusia seutuhnya bagi seluruh lapisan rakyat DIY. Dalam kaidah ini dimensi bu-

daya ditempatkan sebagai arus utama pembangunannya. Dinyatakan pula, sejak kelahiran Yogyakarta, tujuan tersebut sudah tersandung sebagai misi 'istimewa', yang terkandung dalam nilai-nilai filosofis 'Hamemayu-Hayuning Bawana'.

Pada transformasi sosial politik saat ini, media sebagai ruang publik berperan menjadi ruang publik otonom yang mencerahkan dan mengupayakan terbangunnya Keistimewaan Yogyakarta yang menjunjung kemanusiaan. Para pemilik media, redaktur dan jurnalis memaknai media sebagai ruang ekspresi wacana kontra hegemoni melawan dominasi dan hegemoni dominan yang menggunakan sifat heroik berbau kekerasan.

Dalam konteks komunikasi, kontra hegemoni menjadi bagian pemikiran kajian kultural yang mengajak khalayak bukan sebagai pengikut dan penurut namun menyuarakan mulut yang terbungkam, sebab khalayak tidak dungu dan submisif (West and Turner, 2007: 397). Media massa menyediakan ruang bagi beragam wacana, ide, dan praktik budaya Yogyakarta yang arif, santun dan beradab. (Penulis adalah Dekan FISIP Universitas Alma Jaya Yogyakarta; Koordinator Masyarakat Peduli Media (MPM) DIY)-f